****Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 3, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

Selphius Kandou1, Evi. E. Masengi2, Jeinia Gratia Gladies Turang 3

[selpiusrkandou06@gmail.com](mailto:selpiusrkandou06@gmail.com), evielviramasengi@gmail.com , jeiniaturang2@gmail.com

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  ***Effectiveness, Financial Management***  Accepted: 15 Juli 2024  Revised : 20 Juli 2024  Published:31 Juli 2024 |  | ***This research aims to describe and analyze and determine the effectiveness of financial management in The Bank for Exchange and Trade of the Tomohon Region. This study uses a qualitative descriptive study method. Data is taken or collected through observation, interviews and documentation techniques. The results of this research show that the level of effectiveness in the treasury sector of the Tomohon City Regional Financial and Revenue Management Agency, especially in the disbursement of funds for contract workers, is still categorized as quite effective or not yet fully optimal. Seeing the research results shows that there are still problems or obstacles such as delays in issuing SP2D ( Order for Disbursement of Funds) due to carelessness and delays from the relevant agencies in submitting files relating to procedures or requirements for disbursing salaries of contract workers, there is still a lack of State Civil Apparatus and Contract Personnel employees who handle the disbursement of salary funds for contract workers.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**  Efektivitas, Pengelolaan keuangan |  | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif kualitatif. Data diambil atau dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada bidang perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon khususnya pada pencairan dana untuk tenaga kontrak masih dikategorikan cukup efektif atau belum sepenuhnya optimal. Melihat hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah atau kendala seperti keterlambatan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) karena kecerobohan dan keterlambatan dari pihak instansi terkait dalam menyerahkan berkas-berkas yang berkaitan dengan prosedur atau persyaratan pencairan dana gaji tenaga kerja kontrak, masih kurangnya pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang menangani pencairan dana gaji tenaga kerja kontrak.  1 |

# I. Pendahuluan

Akibatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terpecah menjadi wilayah provinsi yang terdiri atas wilayah kota dan wilayah kabupaten. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan dari kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sumber pendanaan yang ada saat ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan tata kelola di wilayah tersebut. [1]

Di dalam suatu daerah atau kabupaten kota sangat diperlukan dengan namanya badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah hal ini dimana badan tersebut bergerak untuk mengatur segala bentuk kegiatan mengenai keuangan dan pendapatan suatu daerah agar bisa berjalan sesuai dengan wewenang atau ketentuan yang berlaku, dengan demikian setiap hal organisasi yang terkait dengan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berfungsi secara efektif.[2]

Maka dalam menjalankan kegiatan ini sangat diperlukan suatu proses yang terarah dan teratur agar mencapai suatu tujuan yang benar dan tepat, dengan demikian kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Agar pengelolaan keuangan dapat dikatakan benar dan tepat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah yang dilandasi cita-cita otonomi yang sejati, menyeluruh, dan bertanggung jawab, maka pendapatan asli daerah merupakan komponen yang sangat penting. Pemerintah kini menggunakan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah sebagai tolok ukur utama dalam penerapan otonomi daerah. (Friska, 2019) Untuk mewujudkan konsep kemandirian daerah secara utuh, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. Pada tahun 2018. [3]

Jadi Badan Pengelolahan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon merupakan salah satu instansi milik daerah yang memiliki wewenang dalam menyelanggarakan dengan penuh pertanggung jawaban serta memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam menjalankan kegiatan ini. Agar kegiatan ini benar-benar terlaksana dengan benar dan tepat.

Berdasarkan data awal atau survey yang dilakukan oleh peneliti Para tenaga kontrak (NAKON) yang bekerja di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah khususnya di bidang perbendaharaan adalah berjumlah 22 orang sudah termasuk dengan Pegawai Negeri Sipil. Instansi ini beralamatkan di Kota Tomohon. Tenaga Harian Lepas yang ada di sini belum bekerja dengan efektif dikarenakan keterlambatan penggajian, misalnya gaji mereka akan di terima per tiga bulan oleh karena anggaran penggajian mereka mengikuti penghasilan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kalau tidak terealisasikan maka akan teejadi keeterlambatan dalam pencairan gaji mereka, ditambah lagi gaji mereka dipotong karena terlabat atau tidak masuk kerja dari faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pencairan dana gaji Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Kontrak namun ada juga kendala yang tak kalah penting yaitu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang masih terlambat di terbitkan dikarena kelalaian dari yang bersangkutan yang akan melakukan pencairan. Kelalaian ini diakibatkan oleh Tenaga Harian Lepas yang belum efektif dalam penyampaian informasi soal berkas dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pencairan dana serta proses penerbitan surat perintah pencarian dana (SP2D) yang masih belum efektif misalnya, Surat Keputusan tidak sesuai contohnya salah dalam pemberian nomor surat, bulan dan tahun, serta pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) yang membutuhkan waktu yang lama, Serta dinas yang akan melakukan pencairan dana gaji tidak membawa Kode Billing, sehingga memperlambat pencairan dana bagi para pegawai dan kurangnya tenaga harian lepas yang bekerja kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi. Misalnya terjadi ketidaktelitian dalam pengecekan berkas tagihan seperti besaran honor tidak sesuai dengan yang di anggarkan seperti sudah di anggarkan hanya berjumlah empat orang namun ketika tagihan masuk sudah menjadi tagihan yang berjumlah enam orang yang mengakibatkan terjadi ketidak sesuaian antara saat pendaftaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Oleh karena itu dibutuhkan Efektifitas dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan Jika dilihat dari target dan realisasi pendapatan daerah, seringkali target tersebut tidak tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa. karena dana pembangunan terlibat dalam hal ini. Ketersediaan dana pembangunan terjamin apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan efektif. Apabila pengelolaannya belum efisien dan efektif, maka perlu didukung atau didorong guna meningkatkan dan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan. Hal ini akan memastikan kemandirian keuangan daerah akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu.

2

**II. Metode Penelitian**

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami subjek penelitian secara utuh guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Baik secara lisan maupun melalui bahasa, dalam situasi tertentu yang dihadapi, dan melalui penerapan beragam teknik ilmiah. [4]

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah serta mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.

Karena peneliti tertarik untuk mengatahui bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Maka lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Dan yang menjadi Fokus penelitian ini adalah permasalahan yang ada di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, masalah yang ada yaitu Efektivitas pencairan gaji tenaga kontrak yang meliputi proses pencairan dan ketepatan pencairan. Sehingga dapat melihat bagaimana pengelolaan keuangan pencairan gaji tenaga kontrak yang ada di Kantor Badan Pengelolaaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Moleong (2013:157) Sumber data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata; tindakan tambahan, termasuk dokumen dan lainnya, merupakan kegiatan yang tersisa. Dokumen, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan data observasi akan digunakan sebagai sumber data.[5]

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik Observasi dan wawancara serta dokumentasi terhadap beberapa narasumber yang ada di lapangan atau secara langsung. Menurut Ahyar (2020) Tujuan wawancara adalah untuk memverifikasi informasi atau data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif, tujuan melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Wawancara untuk penelitian kualitatif dilakukan secara langsung atau tanpa menggunakan panduan wawancara. Wawancara membutuhkan waktu yang lama dalam penelitian kualitatif karena informan dan peneliti memiliki hubungan yang erat. [6]

Untuk menganalisis data hasil penelitian dilapangan oleh karena itu, data adalah alat penting yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban, memvalidasi teori, dan mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan komponen penelitian yang penting karena berdampak pada kualitas temuan. Proses pengumpulan data dikenal dengan istilah pengumpulan data. Proses pengumpulan data empiris dari responden dengan menggunakan teknik tertentu disebut pengumpulan data.[7]

Untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data didalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercheck), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.[8]

# III. Hasil dan Pembahasan

Dengan demikian, untuk proses pencairan gaji tenaga kontrak meliputi langah-langkah yaitu: memiliki surat keputusan tenaga kontrak atau surat keputusan walikota, Check list perangkat daerah, membuat surat perintah membayar (SPM), membawa surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, membuat surat pernyataan verifikasi PPK-SKD, memiliki rekapitulasi daftar gaji/Tenaga kontrak, membawa kode billing serta FMIS.

Pada kenyataannya belum merealisasikan semua langkah-langkah atau persyaratan di mana masih terdapat kendala seperti penomoran, Bulan dan Tahun dalam Surat Keputusan yang salah, Pembuatan surat perintah membayar (SPM) serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan dinas terkait yang akan mengajukan pencairan dana gaji tidak membawah kode Billing atau lupa membawah kode Billing.

Sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditentukan adalah efektivitasnya. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai rasio keluaran terhadap hasil. Hubungan antara produksi dan tujuan dikenal sebagai efektivitas. Suatu organisasi, program, atau kegiatan akan semakin efektif jika outputnya semakin berkontribusi terhadap pencapaian tujuannya. Efektivitas berkonsentrasi pada hasil, sedangkan efisiensi berkonsentrasi pada produksi dan prosedur. Apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan atau dicanangkan, maka organisasi, program, atau kegiatan tersebut dianggap efektif (spending wise).[9]

3

Indikator efektivitas suatu program menunjukkan seberapa baik kinerja program dalam mencapai tujuannya. Semakin produktif suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka akan semakin efisien pula proses kerja unit organisasi tersebut. Efektivitas menurut Gibson dalam Satries (2011, p. 33), dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: [a] Efektivitas individu, yaitu tingkat efektivitas paling mendasar yang fokusnya adalah pada kontribusi individu tertentu dalam suatu organisasi; [b] Efektivitas kelompok, yang menekankan kontribusi seluruh anggota; dan [c] Efektivitas organisasi, yang menggabungkan efektivitas kelompok dan individu untuk menciptakan tingkat keluaran yang lebih tinggi.[10]

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian ini di fokuskan pada efektivitas pengelolaan keuangan pencairan dana gaji tenaga kontrak pada bidang perbendaharaan di Badan Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang di kaji dari beberapa indicator:

1. Proses Pencairan

Permasalahan penggajian merupakan salah satu permasalahan yang paling krusial bagi organisasi pemerintah dan biasanya merupakan permasalahan yang paling rumit. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem akuntansi penggajian yang terkoordinasi secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pembayaran kompensasi pegawai.

Pegawai ASN dan non-ASN BPKPD Kota Tomohon menjadi sasaran prosedur penggajian ini. Hingga saat ini, gaji karyawan harus mematuhi undang-undang yang relevan. Surat keputusan kenaikan pangkat berfungsi sebagai bukti pangkat atau golongan jabatan yang menentukan gaji seorang pegawai untuk pekerjaan pegawai negeri. Sedangkan gaji bagi non-ASN didasarkan pada masa kerja yang juga didukung dengan surat keputusan perjanjian kerja, khususnya bagi pekerja kontrak.

Berdasarkan hasil penelitian beberapadinas yang terkait untuk melakukan pengajuan pencairan dana gaji tenaga kontrak di bidang perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon masih belum efektif, hal ini dibuktikan dengan kemampuan dari dinas yang terkait untuk melakukan pengajuan pencairan dana gaji tenaga kontrak masih belum memahami betul tentang proses dan prosedur yang telah diatur oleh PMK (Peraturan Menteri keuangan), misalnya setiap daftar pegawai tenaga kontrak wajib dan harus memiliki surat keputusan tenaga kontrak atau surat keputusan walikota namun masih terjadi keselahan dalam pengimputan data, misalnya pemasukan nomor, tahun, dan bulan pada Surat Keputusan yang mengakibatkan belum ada Efektifitas dalam pencairan dana gaji bagi tenaga kontrak atau tenaga harian lepas.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang menjadi hambatan dari dinas terkait yang akan melakukan pencairan dana gaji tenaga kontrak, yaitu kurang teliti dalam kelengkapan berkas persyaratan dan kurangnya informasi dari bidang perbendaharaan tentang persyaratan, hal ini dibuktikan oleh salah satu instansi atau dinas yang ada di kota tomohon yang bolak-balik di bidang perbendaharaan karena kurangnya berkas kelengkapan yang ia masukan, misalnya tidak membawa SPM (Surat Perintah Membayar) atau pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) masih membutuhkan waktu yang lama.

1. Ketepatan Pencairan

Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan merupakan hasil kerja individunya. Sumber daya organisasi yang digunakan oleh para pekerja yang ikut aktif berperan sebagai aktor dalam upaya mencapai tujuan organisasi, tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah pegawai yang bekerja di bidang perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon sebanyak 22 orang namun dengan jumlah tersebutdikategorikan belum efektif, hal ini dibuktikan kewalahan pegawai karena menumpuknya pemasukan berkas pencairan dana gaji tenaga kontrak akibat kurangnya pegawai di bagian pemeriksaan berkas dan pendaftaran tagihan pencairan dana gaji tenaga kontrak kemuadian mereka juga bekerja dengan tidak efektif karena mereka belum memahami betul pekerjaan mereka, sehingga pencairan gaji bagi tenaga kontrak tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan sudah termasuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), hal ini dibuktikan dari beberapa aspek yaitu perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Penerbitan SP2D termasuk dalam pengelolaan keuangan pencairan dana gaji tenaga kontrak di bagian penatausahaan.

Berdasarkan hasil penelitian masih terjadi keterlambatan dalam penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sehingga masih dikategorikan belum efektif, hal ini dibuktikan dari kelalain dinas terkait dalam pemasukan kelengkapan berkas-berkas persyaratan di bidang perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan

4

Pendaptan Daerah Kota Tomohon yang kurang lengkap sehingga waktu pemasukan berkas tersebut di bidang

perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah melawati jam operasional kerja sehingga penerbitan SP2D terlambat di terbitkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil kinerja para pegawai di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon belum efektif, hal ini dibuktikan pegawai yang bekerja di bagian pendaftaran yang masih terjadi kelalaian dalam salah penulisan nilai SPM (Surat Perintah Membayar).

**IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas pemberian gaji sudah dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 17 tentang pengupahan terkait gaji untuk pekerja tenaga harian lepas. Sesuai dengan teori efektivitas dari Schemerhon John R. Jr. yang digunakan penelitian ini bahwa keberhasilanpencapaian target melalui efektivitas pengelolaan keuangan sudah berjalan cukup optimal. Namun dari segi porses dan ketepatan pencairan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon telah berjalan cukup optimal, akan tetapi ada beberapa kendala yang dipengaruhi: Proses Pencairan Masih banyak kendala atau masalah yang di dapat yaitu dalam penomoran, bulan, dan tahun pada Surat Keputusan yang masih salah dalam pengimputan data, penerbitan surat perintah membayar yang membuhtukan waktu yang lama, pembuatan surat pernyataan tangggung jawab mutlak PA/KPA, dan dinas terkait lupa membawah kode Billing. Sehingga proses penerbitan SP2D terlabat di terbitkan hal inilah yang mengakibatkan proses pencarian dana gaji bagi tenaga kontrak terhambat. Ketepatan Pencairan, Kinerja pegawai atau ASN dan Nakon belum efektif hal ini di buktikan dalam hasil penelitian yang efektif menunjukan bahwa dalam penerbitan SP2D masih terjadi keterlambatan karena kelalaian dari ASN atau Nakon dalam menerbitkan SP2D seperti kurang memberikan informasi yang jelas keada dinas terkait yang akan melakukan pencairan dana gaji nakon dan sering mengalami miskomunikasi antara pihak administrasi dengan bidang perbendaharaan kota tomohon.

Daftar Pustaka

[1] Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186-199.

[2] Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, 1(2), 82-110.

[3] Rusdi, W., & Aliu, R. (2021). AnalisisEfektifivitasPendapatan Asli Daerah DalamMenilai Kinerja Badan PengelolaanKeuangan Dan Pendapatan Daerah KabupatenBolaangMongondow Selatan. JEKSYAH (Islamic Economics Journal), 1(1), 38-45.

[4] Basuki, Sulistyo. 2006. MetodePenelitian. Jakarta: WedatamaWidya Sastra.

[5] Moleong, Lexy J. 2013. MetodePenelitianKualitatif. EdisiRevisi. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

[6] Ahyar, H. 2020. BukuMetodePenelitianKualitatif&Kuantitatif. Pustaka Ilmu Group Aksara.

[7] Ulber, Silalahi. 2009. MetodePenelitianSosial. Bandung: PT. RefikaAditama.

[8] Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145-151.

[9] Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., &Budiarso, N. (2015). Analisisefisiensi dan efektivitaspengelolaankeuangandaerah pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenMinahasa. Jurnal EMBA: JurnalRiset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4).

[10] Hertanto, Y., Domai, T., & Amin, F. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 15-24.

[11] Rantung, M. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa." *Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8*(2). 2022.

5

[12] H. Darmastuti, “MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PADA JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA DI SMK NEGERI 2 SURABAYA,” 2014.

[13] A. Agiskawati and M. Nasrullah, “EFEKTIVITAS PEMANFAATAN KOMPUTER PADA KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR.”

[14] F. Wirabuana, Y. Liuw, A. Rahman Dilapanga, and T. Wawointana, “Policy Implementation of Electronic Regional Tax Receiving System in Tomohon City.” [Online]. Available: www.techniumscience.com

[15] F. Yuli Ernawati and S. Rochmah, “PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Kendal),” *J. STIE SEMARANG*, vol. 11, no. 2, 2019.

6